

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2015

PT Bank Ina Perdana Tbk

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana diamanatkan di dalam PBI No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, yang diubah dengan PBI No 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas PBI No 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 Perihal : Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, yang mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Penerapan GCG secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan Pemegang Saham dan *Stakeholders* sehingga PT Bank Ina Perdana Tbk dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

PT Bank Ina Perdana Tbk dalam melaksanakan GCG senantiasa berlandaskan pada lima prinsip di atas dan telah dituangkan dalam *up dating* Pedoman GCG yaitu Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* No. COM/001/00/0312 terbit tanggal 30 Maret 2012. Pedoman GCG ini merupakan acuan internal dalam pelaksanaan GCG agar seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada pada Bank, dalam mengelola Bank dan menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan *stakeholders* dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, secara terus menerus dan berkesinambungan.

Uraian singkat prinsip dalam pelaksanaan GCG pada PT Bank Ina Perdana Tbk, adalah sebagai berikut :

A. Keterbukaan (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

B. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank.

Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

C. Tanggung Jawab (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

Sebagai wujud pertanggung jawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

D. Independensi (*Independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

E. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 Perihal : Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum menyebutkan bahwa pelaksanaan GCG merupakan salah satu faktor dalam melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*). Oleh karena itu dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG, setiap Bank harus melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2015

8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal; dan
11. Rencana strategis Bank.

Untuk menelaraskan sesuai dengan POJK No. 32 /POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; No. 33 /POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik; dan No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, maka pada tanggal 1 Desember 2015 Pedoman GCG No. COM/001/00/0312 direvisi menjadi Pedoman GCG No. COM/001/01/1215.

PT Bank Ina Perdana Tbk telah melakukan penilaian sendiri terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2015 dengan meliputi 11 (sebelas) faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, dan telah menyampaikan Hasil Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. OJK/DIR/015/0116 tanggal 29 Januari 2016 Perihal Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Semester II/2015, Laporan Penghitungan KPMM Sesuai dengan Profil Risiko semester II/2015 dan Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Semester II/2015.

Laporan yang kami sajikan ini adalah Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2015 PT Bank Ina Perdana Tbk yang disusun berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2015.

- 000 -

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

A. Jumlah, Komposisi, Kriteria Dan Independensi Anggota Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris PT Bank Ina Perdana Tbk sebagaimana dipertegas oleh Otoritas Jasa Keuangan No. S-1/PB.313/2014 tertanggal 6 Januari 2014 Perihal Susunan Pengurus Bank bahwa Dewan Komisaris Bank Ina adalah sebagai berikut :

Susunan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen
Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Winadewi Hanantha	Komisaris

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Bank Indonesia/OJK sudah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

1. Jumlah Anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang dipimpin oleh Komisaris Utama dan semua Anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
2. 67 % (enam puluh tujuh perseratus) dari jumlah Anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Komisaris Independen ini dapat menciptakan *Check and Balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *stakeholders*.
3. Semua Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
 - a. Birawa Natapradja menjabat sebagai Komisaris Utama Independen setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia melalui Surat Bank Indonesia No. 14/101/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 4 September 2012 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Komisaris Utama menjadi Komisaris Utama Independen.
 - b. Hari Sugiharto menjabat sebagai Komisaris Independen setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia melalui Surat Bank Indonesia No.10/66/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 7 Mei 2008 Perihal Keputusan atas Perubahan Status Jabatan Komisaris PT. Bank Ina Perdana menjadi Komisaris Independen.

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2015

- c. Winadewi Hanantha menjabat sebagai Komisaris setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia melalui Surat Bank Indonesia No. 14/152/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 7 Desember 2012 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Peralihan Jabatan dari Direktur Bisnis Menjadi Komisaris.
4. Tidak ada Anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.

Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh OJK, semua Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik.

5. Semua Anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
6. Semua Anggota Dewan Komisaris memiliki Kompetensi paling kurang mencakup:
 - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
7. Semua Anggota Dewan Komisaris memiliki Reputasi keuangan paling kurang mencakup:
 - a. Tidak memiliki kredit macet;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Sepanjang tahun 2015 Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan data sebagai berikut :

No.	Nama	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
1	Birawa Natapradja	6	0	100%
2	Hari Sugiharto	6	0	100%
3	Winadewi Hanantha	6	0	100%

B. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 12 Juni 2015. Pelaksanaan tugas tahun 2014 tertuang pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat No 48 Tanggal 26 Juni 2015. yang diterbitkan oleh Notaris Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn. Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam Tahun Buku 2014.
2. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan GCG. Dalam melakukan pengawasan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
3. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali :
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.
5. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya.
6. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yakni Pedoman GCG No. COM/001/01/1215, yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Dewan Komisaris. yang mengatur tentang :
 - a. Pengaturan etika kerja;
 - b. Waktu kerja; dan
 - c. Pengaturan rapat.
7. Dewan Komisaris senantiasa menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis kepada OJK dengan tepat waktu. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester II/2015 telah disampaikan melalui surat No. OJK/KOM/001/0216 tanggal 22 Februari 2016, untuk Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester I/2015 disampaikan kepada OJK melalui surat No.OJK/KOM/002/0815 tanggal 24 Agustus 2015.
8. Pengarahan Dewan Komisaris

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2015

- a. Pada tanggal 28 Maret 2015 bertempat di Aston Hotel & Resort – Bogor diselenggarakan Rapat Kerja (Raker) dengan Tema “*On Going Transformation For Future Sustainable Growth*”. dihadiri oleh semua Pimpinan Cabang dan Capem serta Pimpinan Unit Kerja.

Bpk. Birawa Natapradja sebagai Komisaris Utama (Komut) mewakili Dewan Komisaris menyampaikan beberapa hal, antara lain :

- 1.) Bank saat ini dalam proses pengembangan untuk menjadi lebih besar, investor baru telah menetapkan bisnis *plan* diantaranya untuk meningkatkan permodalan Bank sehingga direncanakan pada tahun 2019 Bank Ina sudah dapat masuk Bank BUKU 2.
- 2.) Sebagai persiapan untuk menghadapi rencana perkembangan Bank tersebut perlu dilakukan pembenahan intern diantaranya :
 - a.) Dengan adanya investor baru maka akan terjadi perubahan-perubahan baik *system*, struktur organisasi, teknologi, strategi, budaya kerja dan sebagainya.
 - b.) Strategi bisnis harus dikembangkan terutama dengan menggali sektor-sektor bisnis usaha dengan Group.
 - c.) Struktur Organisasi dan SDM perlu dibenahi, terutama perbaikan komposisi antara SDM Bisnis dengan SDM *supporting*.

- b. Pada tanggal 12 Desember 2015 bertempat di Mercure Hotels Jakarta Sabang – Jakarta Pusat diselenggarakan Rapat Kerja (Raker) dengan Tema “*Sustainable & Quality Growth*”, dihadiri oleh semua Pimpinan Cabang dan Capem demikian juga Pimpinan Unit Kerja. Dalam Acara Raker ini, Bpk. Birawa Natapradja menyampaikan beberapa hal, antara lain :

- 1.) Semua pihak harus menyiapkan diri untuk menerima perubahan yang akan terjadi sehubungan dengan rencana strategik yang diterapkan sesuai dengan arahan Pemegang Saham.
- 2.) Sehubungan dengan rencana strategik Bank untuk mengembangkan transaksi *Digital Banking* maka agar setiap karyawan dapat meningkatkan kemampuan terutama kemampuan dalam bidang teknologi.

9. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Persyaratan dan banyaknya Pihak Independen di Keanggotaan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko terpenuhi.

Yang dimaksud Pihak Independen bagi Anggota Komite adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Ketua Komite Pemantau Risiko dan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi dirangkap oleh 1 (satu) orang, namun perangkapan jabatan ini masih dalam koridor ketentuan Bank Indonesia/OJK.

a. Komite Audit

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris maka diterbitkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/011/0612 Tentang Penunjukan Keanggotaan "Komite Audit" tertanggal 29 Juni 2012, dimana dalam susunan keanggotaan ini telah dipenuhi adanya pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi serta pihak independen yang memiliki keahlian di perbankan. Keanggotaan Komite Audit terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan.

Sehubungan Bank Ina telah menjadi perusahaan "Go Public" untuk itu wajib memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.I.5 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-643/BL/2012, maka pada awal bulan Februari 2014 Bank menerbitkan Piagam Komite Audit yang menjabarkan tentang Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Komite Audit. Dalam piagam tersebut dituangkan pula berupa persyaratan untuk dapat menjadi Anggota Komite Audit. Terkait dengan ketentuan di atas, Keanggotaan Komite Audit disusun ulang dengan tidak lagi melibatkan pihak/Anggota non independen. Perubahan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/003/0214 tertanggal 5 Februari 2014 Tentang Penunjukan Keanggotaan "Komite Audit", dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Susunan Keanggotaan Komite Audit

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen
Anggota	1. Dr. Timotius	Pihak Independen
	2. Edy Sukarno	Pihak Independen
	3. Hari Sugiharto	Komisaris Independen

Pengangkatan Anggota Komite Audit dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan proses seleksi dan penelitian terhadap *track record* masing-masing Anggota sehingga dapat diyakini bahwa semua Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik, yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Anggota Komite Audit.

Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yakni melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:

- 1) Pelaksanaan tugas *Internal Audit Group*;

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2015

- 2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
- 3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
- 4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan *Internal Audit Group*, akuntan publik, dan hasil pengawasan OJK, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 5) Komite Audit telah memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2015 Komite Audit mengadakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali diikuti oleh :

Nama	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
Birawa Natapradja	8	1	87%
Dr. Timotius	8	3	63%
Edy Sukarno	8	1	87%
Hari Sugiharto	8	0	100%

Program Kerja Komite Audit dan realisasinya

- 1). Rapat Komite Audit dilaksanakan secara berkala sesuai kebutuhan, minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Sepanjang tahun 2015, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali, hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

- 2). Pembahasan Hasil Audit KAP

Agenda rapat pada tanggal 8 April 2015 adalah pembahasan hasil audit oleh KAP Mulyamin, Sensi, Suryanto & Lianny untuk tahun buku 31 Desember 2014. KAP Mulyamin melaksanakan audit penuh (*full scope*) atas laporan keuangan PT Bank Ina Perdana Tbk untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014 sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia.

- 3). Pembahasan Hasil Temuan Audit Periode Oktober – Desember 2014

Saran Komite agar jaminan yang berada di kota-kota kecil sebaiknya CCR minimal 200% mengingat jaminan yang terletak di kota-kota kecil jika kredit bermasalah dan dilakukan lelang jaminan, maka jaminan tidak bisa *cover* pokok pinjaman debitor.

- 4). Pembahasan Hasil Temuan Audit Periode Januari – Juni 2015

Saran Komite : *Mapping* Rotasi perlu dilakukan, untuk itu karyawan perlu dibekali pengetahuan yang lebih lengkap sehingga memiliki kemampuan yang memadai saat dilakukan rotasi.

- 5). Agenda rapat tanggal 21 Oktober 2015 adalah pembahasan KAP yang akan melaksanakan pekerjaan audit PT Bank Ina Perdana Tbk untuk tahun buku 2015. Komite merekomendasikan KAP Purwanto, Suherman & Surja yang berafiliasi dengan Ernst & Young untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

b. Komite Pemantau Risiko

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris maka diterbitkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/013/0612 Tentang Penunjukan Keanggotaan "Komite Pemantau Risiko" tertanggal 29 Juni 2012, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Anggota	1. Dr. Timotius 2. Edy Sukarno 3. Birawa Natapradja 4. Winadewi Hanantha	Pihak Independen Pihak Independen Komisaris Utama Independen Komisaris

Dalam susunan keanggotaan ini telah dipenuhi adanya pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan serta pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.

Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan proses seleksi dan penelitian terhadap *track record* masing-masing Anggota sehingga dapat diyakini bahwa semua Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik, yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Komite Pemantau Risiko telah melakukan :

- 1.) Evaluasi tentang kesesuaian antara pelaksanaan tugas komite dengan kebijakan manajemen risiko;
- 2.) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, digunakan sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2015, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali diikuti oleh :

Nama	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
Hari Sugiharto	4	0	100%
Dr. Timotius	4	3	25%
Edy Sukarno	4	0	100%
Birawa Natapradja	4	0	100%
Winadewi Hanantha	4	0	100%

Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan realisasinya

- 1.) Rapat Komite Pemantau Risiko dilaksanakan secara berkala sesuai kebutuhan, minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
Sepanjang tahun 2015, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- 2.) Hasil pemantauan terhadap risiko yang dihadapi Bank.
Peringkat Risiko Komposit Bank di Triwulan III/2015 dinilai dalam Peringkat 2 atau “*Low to Moderate*”. Secara *aggregate* tingkat risiko Bank relatif stabil dibandingkan penilaian risiko periode sebelumnya.
Dengan adanya persetujuan dari OJK per 16 September 2015 bahwa PT. Philadel Terra Lestari dan Bpk. Pieter Tanuri sebagai PSP dan PSPT Bank, membuat Risiko Strategik semakin membaik. Risiko Kepatuhan semakin membaik tercermin tidak adanya denda di Triwulan III/2015. Risiko Pasar cenderung meningkat karena portofolio *trading book* dan *available for sale* meningkat.
- 3.) Komite telah melakukan pemantauan dalam upaya meningkatkan *internal control* dan penerapan APU PPT, direkomendasikan agar *meeting* bidang operasional terus dilakukan secara berkala berkoordinasi dengan *Operation Support Group*.
- 4.) Dalam upaya meningkatkan pengelolaan SDM, komite merekomendasikan perlu dilakukan :
 - a.) Adanya program yang jelas bagi karyawan yang melakukan orientasi kerja.
 - b.) Evaluasi dilakukan secara konsisten terhadap setiap pelaksanaan *training*.
 - c.) Perlu adanya standar *assessment* yang jelas bagi karyawan yang akan dipromosikan.
 - d.) Pelaksanaan rotasi karyawan agar dilakukan secara konsisten.
- 5.) Berkaitan dengan penerapan Program APU-PPT, Komite merekomendasikan *monitoring* dalam aktivitas pembukaan rekening agar ditingkatkan. Pembukaan rekening terhadap “*high risk customer*” dimintakan persetujuan dari Direktur Kepatuhan secara konsisten.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dengan pensiunnya Sdri Wenijati per Juli 2015, menyebabkan berkurangnya keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam rapat Dewan Komisaris tanggal 30 November 2015 diputuskan dan menunjuk Sdri. Agnes Sri Lestari sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang merupakan perwakilan dari karyawan. Untuk menetapkan penunjukan tersebut maka Direksi menerbitkan Surat Keputusan Direksi No.SK/DIR/013a/1215 tanggal 1 Desember 2015, dengan demikian susunan keanggotaan sebagai berikut:

Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Anggota	1. Birawa Natapradja 2. Winadewi Hanantha 3. Agnes Sri Lestari	Komisaris Utama Independen Komisaris Perwakilan Karyawan

Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

- 1.) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
- 2.) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
- 3.) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- 4.) Memberikan rekomendasi mengenai calon Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- 5.) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris;

Sepanjang tahun 2015 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali diikuti oleh :

Nama	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
Hari Sugiharto	7	0	100%
Birawa Natapradja	7	0	100%
Winadewi Hanantha	7	0	100%
Wenijati *)	5	0	100%

Catatan : *) Pensiun Per Juli 2015

Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan realisasinya.

- 1.) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dapat diselenggarakan setiap saat bila diperlukan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Sepanjang tahun 2015, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali, Hasil Rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

- 2.) Dalam proses penyesuaian gaji, Komite mengusulkan tingkat inflasi dan kenaikan Upah Minimum Regional sebagai acuan penyesuaian gaji, dan agar dipertimbangkan mengenai beberapa faktor antara lain pencapaian target dari setiap pimpinan cabang.
- 3.) Komite mengusulkan fasilitas untuk pengurus maupun karyawan sebaiknya di *review* secara berkala untuk disesuaikan dengan kondisi pasar, misalnya berkaitan dengan adanya kenaikan bahan bakar minyak dan sebagainya.
- 4.) Komite mengusulkan perlu dilakukan *survey* terhadap bank sekelas mengenai kepersertaan asuransi kesehatan bagi karyawan. Sementara ini Bank mengikutsertakan penjaminan kesehatan karyawan kepada asuransi swasta dan BPJS Kesehatan.
- 5.) Komite mengusulkan Sdri. Agnes Sri Lestari menjadi Anggota Komite untuk menggantikan Sdri. Wenijati yang telah memasuki masa pensiun.
- 6.) Komite menetapkan pemberian insentif kepada karyawan antara lain berdasarkan *Performance Appraisal* tahun 2014 disamping pertimbangan lainnya yaitu prestasi-prestasi khusus yang telah dicapai.
- 7.) Pemberian gaji ke-14 (tunjangan akhir tahun) bagi karyawan dan pengurus, diusulkan diberikan 2 (dua) minggu sebelum Hari Natal.

C. Rekomendasi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2015 diselenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) kali, hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi, dapat dilihat antara lain :

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2015

1. Sehubungan terbitnya POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi yang diundangkan dan mulai berlaku 8 Desember 2014, maka Dewan Komisaris merekomendasikan agar dilakukan *review* dan penyesuaian Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya POJK tersebut.
2. Dalam Rapat Dewan Komisaris tanggal 10 April 2015, Anggota Rapat secara aklamasi menunjuk Bpk. Birawa Natapradja sebagai Pimpinan RUPS yang akan diselenggarakan tanggal 12 Juni 2015.
3. Memperhatikan pencapaian *budget* sampai dengan Mei 2015, dan mengingat kondisi makro ekonomi yang masih menunjukkan perlambatan pertumbuhan, Dewan Komisaris merasa perlu menyarankan kepada Direksi untuk melakukan *review* dan penyesuaian-penyesuaian RBB 2015-2017 terutama terhadap target bisnis.
4. Memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi dan Nominasi, rapat memutuskan dan menunjuk Sdri. Agnes Sri Lestari sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai perwakilan dari karyawan.
5. Terkait ketentuan yang mengatur mengenai konglomerasi keuangan dan telah ditunjuknya Bank Ina sebagai Entitas Utama, maka diminta kepada Manajemen untuk menindaklanjuti dengan membentuk Struktur Organisasi Tatakelola Terintegrasi (TKT); Struktur Organisasi Komite TKT; Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi; Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan membuat Pedoman TKT.
6. Dalam Rapat yang dilaksanakan tanggal 22 Oktober 2015, membahas penunjukan KAP untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

- 000 -

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Susunan Direksi PT Bank Ina Perdana Tbk sebagaimana dipertegas Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-1/PB.313/2014 tertanggal 6 Januari 2014 Perihal Susunan Pengurus Bank bahwa Susunan Direksi Bank Ina adalah sebagai berikut :

Susunan Direksi

Nama	Jabatan
Edy Kuntardjo	Direktur Utama
Wardoyo	Direktur Kepatuhan
Kiung Hui Ngo	Direktur Operasional

A. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Bank Indonesia telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

1. Jumlah Anggota Direksi sebanyak 3 (tiga) orang dipimpin oleh Direktur Utama dan semua Anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
2. Direktur Utama serta Anggota Direksi lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
3. Semua Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
 - a. Edy Kuntardjo disetujui oleh BI menjabat sebagai Direktur Utama melalui Surat Bank Indonesia No. 13/90/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 9 Agustus 2011 Perihal Keputusan Atas Pengangkatan Direktur Utama.
 - b. Wardoyo disetujui oleh BI menjabat sebagai Direktur Kepatuhan melalui Surat Bank Indonesia No. 14/55/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 12 Juni 2012 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Calon Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
 - c. Kiung Hui Ngo disetujui oleh BI menjabat sebagai Direktur Operasional melalui Surat Bank Indonesia No.15/108/GBI/DPIP/Rahasia Tanggal 18 November 2013 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Calon Direktur Bank.

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2015

4. Tidak ada Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.
5. Tidak ada Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain.
6. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Seperti sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* No. COM/001/01/1215 sebagai revisi dari Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* No. COM/001/00/0312 – Kompetensi dan Integritas Anggota Direksi, yang menyebut “Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu”.

Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Bank Indonesia, Direksi Bank telah memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan, dengan gambaran sebagai berikut :

7. Semua Anggota Direksi memiliki Integritas paling kurang mencakup:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
8. Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup :
 - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan.
 - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
9. Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup :
 - a. Tidak memiliki kredit macet;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
10. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yakni Pedoman GCG No. COM/001/01/1215, yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi yang mengatur tentang :

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2015

- a. Pengaturan etika kerja;
- b. Waktu kerja; dan
- c. Pengaturan rapat.

B. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan GCG yakni sebagai berikut :

1. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 12 Juni 2015. Pelaksanaan tugas tahun 2014 tertuang pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat No 48 Tanggal 26 Juni 2015, yang diterbitkan oleh Notaris Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn. Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh Anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dalam Tahun Buku 2014.
2. Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari *Internal Audit Group*, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, PPATK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. Dalam acara Raker tanggal 28 Maret 2015, Dirut meminta agar rapat bulanan di kantor-kantor cabang supaya rutin dilakukan sebagai media untuk pembahasan atas hasil temuan audit.
4. Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Direksi memberi perhatian serius dalam mewujudkan Pelaksanaan GCG agar senantiasa berjalan dengan baik pada seluruh insan organisasi Bank, untuk itu berbagai upaya telah dilakukan, antara lain :

a. Pengarahan Direksi

- 1.) Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap tindakan *Fraud* dan menumbuhkan budaya *anti fraud* maka Bank menyelenggarakan Sosialisasi Pengendalian Intern dan Anti *Fraud* pada karyawan dengan nara sumber dari internal Bank. Dalam Acara ini, Direktur Kepatuhan (Dirkep) turut memberikan pengarahan kepada Peserta Sosialisasi, dimana Dirkep memberi motivasi kepada Peserta agar bekerja dengan baik dan senantiasa mengembangkan diri, jujur dan tetap menjauhkan diri dari tindakan *fraud* yang dapat merugikan Perusahaan demikian juga diri sendiri.
- 2.) Pada tanggal 28 Maret 2015 bertempat di Aston Hotel & Resort – Bogor diselenggarakan Rapat Kerja (Raker) dengan Tema “*On Going Transformation For Future Sustainable Growth*”. dihadiri oleh semua Pimpinan Cabang dan Capem serta Pimpinan Unit Kerja.

Bpk. Edy Kuntardjo sebagai Direktur Utama (Dirut) menyampaikan beberapa arahan penting dalam Raker tersebut, antara lain :

- a.) Hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang sudah dikonfirmasi kepada OJK. Tingkat Kesehatan BIP per posisi Desember 2014 pada predikat 2 (sehat). Dengan demikian sejak posisi Juni 2012 BIP dapat mempertahankan tingkat kesehatan dengan predikat “sehat”. Hal ini merupakan suatu prestasi yang baik sebagai bank skala kecil (BUKU 1). Oleh karena itu manajemen mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan yang telah memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian kinerja Bank.
 - b.) Pimpinan harus peka terhadap perubahan kondisi makro ekonomi dan lingkungannya (bisnis dan karakter nasabah).
 - c.) Pimpinan cabang dan *Head* unit kerja harus peka terhadap lingkungannya sehingga dapat mengantisipasi pencegahan Bank dari kejahatan perbankan yang semakin marak, khususnya konspirasi dengan pihak karyawan Bank. *Dual Control* harus berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan sehingga Bank Ina dapat terhindar dari risiko operasional dan risiko kredit bermasalah yang dapat berdampak pada kerugian Bank. Dalam pelaksanaan mitigasi risiko, Dirut berpesan agar aspek pengawasan melekat dapat ditingkatkan.
 - d.) *Customer First* menjadi pintu gerbang yang pelaksanaannya harus dipertanggung jawabkan oleh setiap Pemimpin Cabang. Pimpinan menjadi *role model* untuk mewujudkan kebersihan, sopan & ramah, serta tertib dalam berpenampilan.
- 3.) Pada tanggal 12 Desember 2015 bertempat di Mercure Hotels Jakarta Sabang – Jakarta Pusat diselenggarakan Rapat Kerja (Raker) dengan Tema “*Sustainable & Quality Growth*”, dihadiri oleh semua Pimpinan Cabang dan Capem demikian juga Pimpinan Unit Kerja. Dalam Acara Raker ini, Bpk. Edy Kuntardjo menyampaikan beberapa hal penting, antara lain :
- a.) Sebagai tindak lanjut atas penyampaian visi-misi yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham Pengendali, maka setiap karyawan diminta untuk bekerja dengan baik dan bersifat terbuka terhadap sesuatu hal yang baru dalam pengembangan bisnis bank sehingga dapat mendukung arah dan strategi bisnis baru Bank.
 - b.) Pimpinan unit kerja agar dapat menjadi teladan dengan mengedepankan sifat jujur dan menjunjung tinggi integritas dalam upaya mendukung penerapan *Prudential Banking* yaitu dengan memenuhi aturan-aturan main yang ditetapkan.
- b. *Sense of Belonging*
- Manajemen menyadari bahwa kekompakan dan kebersamaan serta rasa saling memiliki (*sense of belonging*) terhadap Bank dirasa merupakan suatu hal yang penting yang menjadi pendorong sikap saling menjaga dan memelihara semua asset Bank, baik itu yang bernilai material maupun non material (Reputasi, *Good Will*).

Dalam upaya mewujudkan kekompakan dan kebersamaan serta rasa saling memiliki (*sense of belonging*), Bank menyelenggarakan *gathering* pada tanggal 9 dan 10 Mei 2015 bertempat di kota Yogyakarta diikuti sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) karyawan dari seluruh kantor Bank Ina.

5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Direksi telah membentuk:

a. *Audit Intern Group*

Audit Intern Group bertugas untuk menjamin berfungsinya pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal Bank. *Audit Intern Group* dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional, sehingga dapat bekerja dengan bebas dan objektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan Bank.

b. Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas Bank. Proses penilaian risiko yang dilakukan telah melingkupi seluruh jenis risiko (8 jenis risiko) dan dilaporkan secara rutin kepada Bank Indonesia.

c. Satuan Kerja Kepatuhan.

Satuan Kerja Kepatuhan (*compliance unit*) merupakan satuan kerja yang independen, dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk di kantor pusat Bank, namun melaksanakan Fungsi Kepatuhan di seluruh jaringan kantor Bank.

Satuan Kerja Kepatuhan berfungsi untuk memastikan dan menjaga bahwa seluruh aktivitas Bank telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini.

Satuan Kerja Kepatuhan melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

- 1.) Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- 2.) Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- 3.) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 4.) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau Otoritas pengawas lain yang berwenang.

d. Komite Manajemen Risiko

Komite ini berfungsi untuk membantu Direksi dalam menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko agar sesuai dengan *risk appetite* dan strategi manajemen risiko Bank.

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2015

Selain Satuan Kerja Kepatuhan dan Komite Manajemen Risiko seperti disebut di atas, Direksi juga telah membentuk :

- e. Komite Kredit;
- f. Komite Kebijakan Kredit;
- g. ALCO;
- h. Komite IT Steering;
- i. Komite Strategi *Planning & Budgeting*;
- j. Komite Sumber Daya Manusia.

Sepanjang periode laporan tahun 2015 telah diadakan 12 (dua belas) kali rapat Direksi, yang diikuti oleh :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
1	Edy Kuntardjo	Direktur Utama	12	0	100%
2	Wardoyo	Direktur Kepatuhan	12	0	100%
4	Kiung Hui Ngo	Direktur Operasional	12	0	100%

C. Rapat Bersama Dewan Komisaris Dengan Direksi

Dalam tahun 2015, dilaksanakan Rapat bersama Dewan Komisaris dengan Direksi sebanyak 10 (sepuluh) kali, hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Rapat Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
1	Edy Kuntardjo	Direktur Utama	10	0	100%
2	Wardoyo	Direktur Kepatuhan	10	0	100%
3	Kiung Hui Ngo	Direktur Operasional	10	0	100%
4	Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen	10	0	100%
5	Hari Sugiharto	Komisaris Independen	10	0	100%
6	Winadewi Hanantha	Komisaris	10	2	80%

- 000 -

BAB IV

ASPEK TRANSPARANSI DALAM PELAKSANAAN GCG

Aspek transparansi sebagai salah satu prinsip pokok dalam pelaksanaan GCG, diuraikan sebagai berikut :

A. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 31 Desember 2013, pelaksanaan Pencatatan Saham di Bursa diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014. Jumlah saham baru yang ditawarkan sebanyak 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta) lembar saham biasa dimana nilai nominal saham Rp. 100,- (seratus rupiah) per lembar dengan harga penawaran Rp. 240,- (dua ratus empat puluh rupiah) per lembar saham. Seiring PT Bank Ina Perdana Tbk telah tercatat di Bursa, di tahun 2014 terjadi beberapa kali transaksi penjualan saham oleh Pemegang Saham Pendiri, sehingga Komposisi Kepemilikan Bank mengalami perubahan, Per Desember 2014 PT Philadel Terra Lestari dengan kepemilikan sebesar 20% diajukan kepada OJK sebagai PSP Bank dan Bpk. Pieter Tanuri sebagai PSPT.

Bpk. Yohanes Ade Bunian Moniaga selaku Direktur yang mewakili PT Philadel Terra Lestari sebagai calon PSP, dan Bpk. Pieter Tanuri sebagai calon PSPT mengikuti wawancara dalam rangka *Fit and Proper Test* pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015. Tanggal 16 September 2015, OJK menyetujui PT Philadel Terra Lestari sebagai (PSP) PT Bank Ina Perdana Tbk. Dalam surat yang disampaikan oleh OJK, disebut bahwa PSP Bank adalah PT Philadel Terra Lestari dan Bpk. Oki Widjaja, sedangkan PSPT adalah Bpk. Pieter Tanuri dan Bpk. Oki Widjaja.

Komposisi Kepemilikan Bank posisi 31 Desember 2015 sesuai Daftar Pemegang Saham (DPS) dari PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek (BAE) adalah sebagai berikut :

No	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham Rp. 100/lembar	Nominal	%
1	Oki Widjaja	84.030.000	Rp.8.403.000.000	4,00%
2	OCBC Securities Pte Ltd-Client A/C	790.000.000	Rp.79.000.000.000	37,62%
3	PT Philadel Terra Lestari	420.000.000	Rp.42.000.000.000	20,00%
4	Masyarakat dalam penitipan kolektif PT KSEI	520.000.000	Rp52.000.000.000	38,38%
Total		2.100.000.000	Rp210.000.000.000	100,00%

Di dalam komposisi Pemegang Saham Masyarakat di atas, sebagian dimiliki oleh Karyawan Bank Ina melalui Program *Employee Stock Allocation* (ESA).

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2015

Sepanjang tahun 2015, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham Bank Ina, bank lain maupun LKBB sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (%)			
		Bank Ina	Bank Lain	LKBB*)	Perusahaan
Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen	0%	0%	0%	0%
Hari Sugiarto	Komisaris Independen	0%	0%	0%	0%
Winadewi H	Komisaris	0%	0%	0%	0%
Edy Kuntardjo	Direktur Utama	0%	0%	0%	0%
Wardoyo	Direktur Kepatuhan	0%	0%	0%	0%
Kiung Hui Ngo	Direktur Kepatuhan	0%	0%	0%	0%

Catatan : *) LKBB = Lembaga Keuangan Bukan Bank

B. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank berasal dari kalangan profesional dan seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Anggota Direksi Bank dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

C. Paket/Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris Dan Direksi

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2015, disajikan sebagai berikut :

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) *)	3	1.315	3	3.122
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya)	-	-	-	-
Total	3	1.315	3	3.122

Catatan : *) Diterima secara tunai

D. Share Option

Di dalam komposisi Kepemilikan Bank posisi 31 Desember 2015, sebagian saham dimiliki oleh Karyawan Bank Ina. Adapun kepemilikan saham ini dilakukan melalui Program *Employee Stock Allocation* (ESA) dimana perusahaan memberikan kesempatan kepada Karyawan di luar Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) untuk membeli Saham Bank Ina pada saat pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham. Adapun tujuan Program tersebut adalah untuk meningkatkan dan memelihara segi rasa memiliki (*sense of belonging*); loyalitas dan integritas; serta produktivitas kerja dan kinerja sehingga *going concern* kinerja korporasi dapat berhasil dengan baik yang dapat dinikmati oleh *stakeholders* Perseroan. Dalam tahun 2015, tidak ada *share option* bagi Komisaris dan Direksi.

Keterangan /Nama		Jumlah Saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)	Jangka Waktu
			yang diberikan (lembar saham)	yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Komisaris	Semua	0	0	0	N.A	N.A
Direksi	Semua	0	0	0	N.A	N.A
Pejabat Eksekutif	Semua	30.500	21.500	0	240/lbr	N.A
Total		0	0	0	N.A	N.A

E. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Perbandingan gaji tertinggi dengan gaji terendah Komisaris, Direksi dan Pegawai disajikan per posisi 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

- ~ Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah : 15,93 x
- ~ Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah : 1,55 x
- ~ Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah : 1.18 x
- ~ Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi : 3,04 x

F. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Bank serius untuk mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan terjadinya *Fraud*, kolusi dan penyalahgunaan wewenang.

Untuk itu dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap tindakan *Fraud* dan menumbuhkan budaya *anti fraud*, maka Bank menyelenggarakan Sosialisasi Pengendalian Intern dan *Anti Fraud* pada karyawan dengan nara sumber dari internal Bank.

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2015

Dalam Acara ini, Direktur Kepatuhan (Dirkep) ikut serta memberikan pengarahan kepada Peserta Sosialisasi, dimana Dirkep memberi motivasi kepada Peserta agar bekerja dengan baik dan senantiasa mengembangkan diri, jujur dan tetap menjauhkan diri dari tindakan *fraud* yang dapat merugikan Perusahaan demikian juga diri sendiri.

Sebagai bagian dari *Know Your Employee* dalam Strategi Anti *Fraud* maka secara berkala dilakukan BI *Checking* kepada seluruh Pengurus dan Karyawan Bank, sebagai antisipasi dini terhadap kemungkinan adanya Pengurus dan Karyawan yang mengalami kredit macet. Hal ini merupakan suatu upaya untuk menjauhkan salah satu unsur penyebab terjadinya *fraud* berupa *Pressure* (tekanan) yang dialami karyawan.

Upaya lainnya yang dilakukan Bank untuk mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan melakukan *Fraud* serta kolusi dan penyalahgunaan wewenang, maka dalam tahun 2015, telah dilakukan :

1. Proses mutasi dan rotasi beberapa karyawan.
2. Pemberian izin cuti kepada karyawan yang telah memiliki hak cuti sebagaimana yang diatur dalam ketentuan "Cuti".
3. Penambahan *Staff* di beberapa unit kerja
4. Program *Surprise Audit*.

Audit Intern Group melakukan *Surprise Audit* ke beberapa Kantor Cabang/ Unit Kerja. Rencana *Surprise Audit* hanya diketahui oleh *Internal Audit Group Head* dan Direktur Utama, dengan demikian pelaksanaan pemeriksaan ini tanpa pemberitahuan kepada Kantor Cabang/Unit Kerja yang akan diperiksa.

Sepanjang tahun 2015, tidak ada *fraud* yang terjadi, Jumlah internal *fraud* disajikan dalam tabel berikut :

Internal <i>Fraud</i> dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan	0	0	0	0	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0

G. Permasalahan Hukum

Sepanjang tahun 2015 tidak ada Permasalahan Hukum yang dihadapi oleh Bank

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0
Total	0	0

Sebagaimana kami sampaikan dalam laporan periode sebelumnya bahwa ada Permasalahan Hukum dengan PPA yang sudah berlarut-larut sejak tahun 2007. Untuk memitigasi risikonya maka pada akhir bulan Desember 2012, Bank telah mencadangkan dana sebesar Rp. 1.419.039.389,- yakni 100% (seratus persen) dari perkiraan tagihan PPA. Sepanjang tahun 2015 tidak ada penagihan dari Pihak PPA, namun demikian Bank masih tetap membukukan dana tersebut di atas dalam bentuk cadangan, sebagai langkah antisipasi bilamana kesepakatan dengan PPA dapat tercapai pada tahun 2016. Dengan adanya cadangan ini maka risiko dari tagihan PPA telah dapat *discover* sepenuhnya.

H. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Pengurus Bank terdiri dari :

- a. Dewan Komisaris Bank beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama Independen, 1 (orang) orang Anggota Komisaris Independen dan 1 (satu) satu orang Anggota Komisaris.
- b. Direksi Bank beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan dan 1 (satu) orang Direktur Operasional yang semuanya berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.

Dengan adanya keberadaan Komisaris Independen, Direktur yang Independen serta pihak-pihak independen pada keanggotaan komite diharapkan dapat menciptakan *check and balance* sehingga dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*). Namun demikian guna menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank, telah disusun suatu ketentuan mengenai penanganan benturan kepentingan.

Bank juga senantiasa berupaya agar benturan kepentingan tidak terjadi pada kalangan Pegawai Bank. Untuk itu dalam acara Training Strategi anti *Fraud* setiap peserta/karyawan atas kesadarannya menandatangani “Deklarasi Anti *Fraud*” dan “Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan”.

Sejak akhir Desember 2015, Komitmen Karyawan Bank berupa Deklarasi Pernyataan Anti *Fraud*; Janji Karyawan; dan Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan demikian juga Kode Etik Prilaku Karyawan telah disajikan dalam *situs web* Bank Ina serta *intranewsina*.

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2015

Sepanjang tahun 2015, tidak terdapat transaksi yang melibatkan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pemegang Saham Pengendali yang mengandung potensi benturan kepentingan.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

Catatan :

*) Tidak sesuai sistim dan prosedur yang berlaku

I. *Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank*

Sepanjang tahun 2015 tidak ada *buy back shares* dan sampai sejauh ini Bank belum pernah menerbitkan Obligasi.

J. *Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)*

Penyediaan dana kepada Pihak terkait Bank senantiasa mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Sepanjang tahun 2015 tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Jumlah penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti per posisi 31 Desember 2015 secara total disajikan sebagai berikut :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Pihak Terkait *)	26	102.702
2	Debitur Inti	15	504.162

Catatan : *) termasuk penyediaan dana *cash collateral*

K. *Rencana Strategis Bank*

Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (*SWOT Analysis*). Dalam menetapkan Rencana Bisnis, Bank senantiasa berpedoman kepada prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), termasuk rencana bisnis yang realistis, dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal sehingga rencana bisnis yang dibuat dapat menjadi sarana untuk mengendalikan risiko strategis.

1. Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*)

Bank telah memiliki *Corporate Plan* yang merupakan rencana strategis Bank jangka panjang dengan gambaran singkat sebagai berikut :

a. Strategi Perusahaan

- 1.) Pertumbuhan kredit berkualitas pada sektor komersial produktif yang disesuaikan dengan kemampuan permodalan Bank sebagai kelompok Bank pada strata BUKU 1.
- 2.) Melakukan pembenahan infrastruktur, terutama terkait dengan kecukupan SDM berkualitas, penerapan manajemen resiko dan prosedur operasional.
- 3.) Meningkatkan penghimpunan dana masyarakat dengan pencapaian pada *cost of fund* yang ideal sehingga mampu mendukung fungsi intermediasi Bank yang menghasilkan laba usaha memadai.
- 4.) Meningkatkan integritas, kapasitas dan kompetensi SDM melalui berbagai pelatihan dan seminar, baik yang bersifat *hard skill* maupun *soft skill*.

b. Kebijakan dan strategi manajemen

1.) Perspektif keuangan

- a.) Pertumbuhan DPK (Dana Pihak Ketiga) dengan *cost of fund* ideal.
- b.) Pencapaian rasio rentabilitas sesuai indikator tingkat kesehatan pada peringkat PK-2 (Sehat).
- c.) Memelihara kualitas aktiva produktif pada rasio rendah di bawah 2 %.
- d.) Menjaga kecukupan pemenuhan (CAR) pada rasio 12 % - 14 %.

2.) Perspektif Pelanggan

- a.) Pertumbuhan kredit komersial produktif dengan target minimal 55 % dari total kredit, termasuk pencapaian pembiayaan UMKM minimal 20 % dari total kredit.
- b.) Perluasan *customer base funding*, khususnya potensi di kalangan sekolah/universitas Kristen yang tersebar luas di berbagai kota, yang saat ini baru terlayani 5 % - 10 %.
- c.) Menjalinkan kerjasama dengan institusi sekolah/perusahaan untuk pengembangan kredit konsumsi (KTA, KPR dan KKB) dan pengembangan *wholesale banking* yaitu kemitraan dengan institusi keuangan sebagai penyeimbang pencapaian target kredit.
- d.) Meningkatkan kualitas layanan cabang (*service excellence*).

3.) Perspektif Proses Bisnis Internal

- a.) Penguatan implementasi *Good Corporate Governance* dan *Risk Management*, produktivitas karyawan dan budaya anti *fraud*.

- b.) Perbaiki *business process*, diantaranya penyederhanaan proses kredit, peningkatan *product development process*.
- 4.) Perspektif Pengembangan
 - a.) Program pendidikan – *Officer Development Program* (ODP).
 - b.) Pembenahan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu segi kebijakan, segi *assessment* dan hubungan karyawan, segi pendidikan dan pelatihan, serta segi administrasi dan *system* informasi.
- 2. Rencana Jangka Pendek Dan Jangka Menengah (*business plan*)

Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2015 – 2017 diterbitkan tanggal 28 Nopember 2014.

a. Target Jangka Pendek (Tahun 2015)

Mempertimbangkan kondisi ketidakpastian yang tinggi pada perekonomian domestik tahun 2015 dan Bank masih dalam ‘masa transisi’, maka target 1 tahun ke depan kegiatan usaha bertemakan “konsolidasi” dengan pertumbuhan kredit sangat konservatif sebesar 10% sebagai antisipasi masih berlangsungnya perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Manajemen juga fokus pada pembenahan infrastruktur sumber daya manusia dan informasi teknologi untuk dapat menyiapkan *core* bisnis model yang baru serta kecukupan terselenggaranya *internal control*.

1.) Target Finansial

- a.) Meningkatkan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp.143,43 miliar menjadi Rp.1,67 triliun pada akhir Desember 2015, tumbuh 9,39% dibanding posisi akhir Desember 2014.
- b.) Meningkatkan kredit yang diberikan sebesar Rp.130,26 miliar menjadi Rp.1,43 triliun tumbuh 10,02% dari proyeksi akhir Desember 2014, dimana porsi untuk kredit komersial (produktif) mencapai 80%, dimana porsi kredit untuk sektor UMKM mencapai 55% dari total portofolio kredit.
- c.) Pertumbuhan total asset sebesar Rp.315,50 miliar menjadi Rp.2,6 triliun di Desember 2015.
- d.) Memperoleh laba bersih setelah pajak sebesar Rp.13,29 miliar dengan pendapatan bunga bersih sebesar Rp.76,28 milyar. Perolehan laba bersih diproyeksikan sedikit menurun dibandingkan dengan pencapaian laba bersih tahun 2014 karena pertumbuhan kredit relatif terbatas sebesar Rp.10%, termasuk NIM, dan biaya overhead yang sedikit meningkat untuk penambahan infrastruktur SDM dan IT.
- e.) Dilakukan penambahan modal melalui *right issue* pada triwulan IV/2015 sebesar Rp.150 milyar untuk memenuhi besaran modal inti sesuai jaringan kantor yang dimiliki.

2.) Target Non Finansial

- a.) **Bisnis**
 - i. Pemberian kredit untuk tahun 2015 diarahkan ke sektor komersial produktif dengan target 80% dan sisanya 20% konsumsi sehingga mampu memenuhi target portofolio kredit produktif Bank skala BUKU 1 sebesar 55% dari total portofolio kredit, termasuk 20% UMKM. Bisnis dengan konsep B2B atau *wholesale banking* melalui kerjasama dengan *Multifinance*, BPR, koperasi, dan perusahaan *ventura* dalam kaitannya pembiayaan usaha-usaha kecil dan mikro produktif. Khusus kerjasama dengan *Multifinance* dibatasi pertumbuhannya sehingga Bank tidak mempunyai ketergantungan tinggi pada kemitraan tersebut. Sebagai pengganti akan di kembangkan kredit mikro untuk pedagang ritel dan kredit konsumsi seperti KTA, KPR, KKB dan multiguna yang sudah mulai dikembangkan tahun 2014.
 - ii. Mengusahakan pertumbuhan dana pihak ketiga, khususnya dana murah dengan menerapkan strategi promosi yang sesuai dan *cross selling* dengan penyediaan layanan *pickup service* dan modul edukasi.
 - iii. Peningkatan kinerja kantor-kantor cabang agar mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan Bank.
 - iv. Mengoptimalkan kelebihan likuiditas Bank, dengan tetap memperhatikan *risk & return*.
- b.) **Operasional**
 - i. Pencapaian peringkat komposit tingkat kesehatan Bank Ina pada peringkat PK 2 (Sehat) secara berkesinambungan.
 - ii. Menyempurnakan sistem pengendalian internal pada aktivitas operasional dan perkreditan melalui perbaikan secara berkelanjutan pada kebijakan dan prosedurnya.
 - iii. Memperkuat *risk control system* dengan prioritas untuk aktivitas perkreditan dan IT.
 - iv. Menyempurnakan kebijakan-kebijakan di bidang operasional, perkreditan, dan kepatuhan yang merupakan konsekuensi sebagai perusahaan terbuka.
- c.) **Sumber Daya Manusia**
 - i. Memperkuat struktur organisasi di Kantor Pusat dalam kaitan pengembangan persiapan bisnis model baru, khususnya ketersediaan kompetensi bidang SDM dan IT.
 - ii. Meneruskan *up dating job description dan job requirment* untuk masing-masing jabatan sesuai perkembangan struktur organisasi Bank.

- iii. Menyempurnakan struktur organisasi Kantor Cabang, disesuaikan dengan *size* bisnisnya agar mampu mengantisipasi risiko operasional maupun risiko kredit.
 - iv. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan SDM yaitu segi kebijakan, segi *assessment* dan hubungan karyawan, segi pendidikan dan pelatihan, dan segi administrasi dan sistem informasi.
- d.) Lain-lain
- i. Meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi melalui komite-komite penunjang yang telah dibentuk.
 - ii. Meningkatkan kualitas pemeriksaan internal dengan menggunakan sistem *scoring* penilaian audit.
 - iii. Melakukan relokasi Kantor Pusat Non Operasional (KPNO) dan Kantor Pusat Operasional (KPO) agar mampu memberikan *branding* baru. Untuk mempertahankan bisnis yang ada di tempat sekarang (Wisma BSG – Abdul Muis), direncanakan pembukaan kantor cabang pembantu sepanjang penambahan modal *tier* 1 dapat dipenuhi.
 - iv. Melakukan penggantian *core banking* Bank untuk dapat mengakomodasi perkembangan dan pertumbuhan layanan bisnis model yang baru.
 - v. Menambah modul aplikasi yang dapat mendukung pertumbuhan usaha dan peningkatan pelayanan kepada nasabah seperti pengembangan *debit card* baik sebagai *issuer* maupun *acquirer*, pengembangan *virtual account*, dan penambahan mesin EDC.
 - vi. Menambah mesin-mesin ATM di sekolah/universitas, rumah sakit, dan kantor Bank serta lokasi lain yang sudah bekerjasama dengan Bank.
- b. Target Jangka Menengah (tahun 2016 – 2017)

Target jangka menengah 3 (tiga) tahun kedepan di arahkan pada perwujudan bisnis baru sebagai Bank dengan layanan bisnis perbankan transaksi (*transactional banking*) dan penyaluran kredit segmen mikro kecil dengan dukungan infrastruktur berbasis teknologi informasi.

1.) Target Finansial dan Non Finansial

- a.) Meningkatkan Dana Pihak Ketiga menjadi Rp.1,96 triliun di tahun 2016 dan menjadi Rp.2,32 triliun di tahun 2017.
- b.) Meningkatkan kredit diberikan menjadi Rp.1,67 triliun di tahun 2016 dan menjadi Rp.1,97 triliun di tahun 2017.
- c.) Total asset ditargetkan di tahun 2016 sebesar Rp.2,49 triliun dan tahun 2017 sebesar Rp.3,18 triliun.

- d.) Perolehan laba bersih setelah pajak untuk tahun 2016 dan 2017 masing-masing diperkirakan sebesar Rp.26,28 miliar dan Rp.36.43 miliar.
- e.) Mempertahankan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank minimal PK 2 (sehat).
- f.) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.
- g.) Memperluas pengenalan *corporate brand image*.

Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik tercermin pada komitmen PSP/PSPT baru untuk memperkuat permodalan bank, berupa penambahan porsi kepemilikan modalnya pada PT Bank Ina Perdana Tbk sampai dengan 30% dan surat pernyataan tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham dalam jangka waktu 5 tahun.

Bpk. Pieter Tanuri mewakili pemegang saham menyempatkan hadir pada acara Raker tanggal 12 Desember 2015, dimana Beliau memberi pengarahan dan menyampaikan misi untuk menjadikan Bank Ina sebagai Bank kelas atas dalam dunia perbankan, melalui pengembangan transaksi *Digital Banking*. Rencana strategik tersebut akan didukung dengan peningkatan modal secara bertahap sehingga PT Bank Ina Perdana Tbk dapat memenuhi persyaratan permodalan sebagai Bank BUKU II.

L. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya

Sebagaimana disebut dalam prinsip GCG menyangkut keterbukaan, Bank senantiasa melakukan transparansi kondisi keuangan dan kinerja Bank dengan prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang bersifat material dan relevan. Aspek Transparansi dilakukan melalui Publikasi Laporan Bank sehingga dapat memudahkan penilaian dari publik dan pelaku pasar mengenai gambaran Bank yang sebenarnya. Informasi yang diungkapkan kepada publik berupa Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, disajikan melalui *Homepage* Bank serta melalui Surat Kabar yang berperedaran nasional. Publikasi Laporan Bank telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia/OJK baik berupa substansi laporan, media yang digunakan, maupun waktu pelaporan.

Pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 bertempat di Gedung BEJ Tower II Lantai 1, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta Selatan, Bank menyelenggarakan *Public Expose* dengan Tema "Pencapaian Kinerja Yang Tetap Konsisten Mengedepankan Prinsip Kehati-hatian Di Tengah Tantangan Kelesuan Ekonomi". *Public Expose* merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban perusahaan terbuka kepada *Stake holders*.

Kewajiban Perusahaan Terbuka untuk melaporkan Keterbukaan Informasi Yang Perlu di Ketahui Publik juga dilaksanakan oleh Bank, dimana dari bulan Juni s.d Desember 2015, Bank menyampaikan Keterbukaan Informasi atas Risalah atau Akta Pernyataan Keputusan Rapat Atas RUPS Tahunan PT Bank Ina Perdana Tbk; Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Kualifikasi Direksi Independen; Perubahan PSP/PSPT; dan Relokasi Kantor Capem Dewi Sartika ke Jl. Karang Tengah Cilandak.

M. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan Politik

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk komitmen Bank untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi pada pembangunan nasional berupa kepedulian kepada masyarakat, dengan cara memberi bantuan kepada masyarakat yang dinilai layak untuk menerima bantuan tersebut.

Sebagai tanggung jawab sosial Bank terhadap masyarakat, pada tanggal 3 Desember 2015 PT Bank Ina Perdana Tbk bekerja sama dengan PT Dana Mandiri Sejahtera mengadakan kegiatan CSR di Mande, Cianjur - Jawa Barat dengan Tema acara "Program Bina Pedagang Wanita Sektor Mikro Produktif".

Dalam acara ini, Bank memberikan bantuan dalam bentuk bingkisan kepada 30 (tiga puluh) orang *end user* dari mitra bank- PT Mandiri Sejahtera berupa 15 (lima belas) unit Kompor Gas Rinai 2 Tungku dan 15 (lima belas) unit *Water Dispenser Hot & Cold* merek Miyako. Penerima bantuan ini adalah wanita yang memiliki usaha di bidang sektor ekonomi produktif sebagai pedagang makanan dan minuman, yang memiliki reputasi baik sebagai nasabah PT Mandiri Sejahtera. Dengan pemberian bingkisan ini, diharapkan penerima bingkisan dapat meningkatkan produktifitasnya di waktu yang akan datang.

- 000 -

BAB V

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN, FUNGSI AUDIT EKSTERNAL DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

A. Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (*preventif*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia/OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, sepanjang tahun 2015 Bank senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku dengan berpedoman kepada tindakan Fungsi Kepatuhan Bank, sehingga diharapkan potensi risiko yang akan muncul dapat diantisipasi lebih dini. Bank juga telah menerapkan sistem pengendalian intern dan melakukan *monitoring* atas pelaksanaannya, namun demikian dari banyaknya laporan yang harus disampaikan masih terdapat beberapa laporan yang dalam pelaksanaannya mengalami keterlambatan dan/atau perlu dikoreksi kembali. Dalam tahun 2015, Bank dikenakan denda oleh OJK sebesar Rp.5.730.000,- dimana sebesar Rp.5.200.000,- dari denda tersebut merupakan pengenaan denda di tahun 2014 yang penagihannya dilakukan tahun 2015. Dengan demikian denda di tahun 2015 sebesar Rp. 530.000,-.

Dalam rangka meningkatkan Fungsi Kepatuhan guna meminimalisir pengenaan denda oleh BI, OJK maupun Otoritas lain, baik sebagai akibat dari kesalahan dan atau keterlambatan penyampaian laporan, maka dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Bank telah melakukan evaluasi internal terhadap mekanisme penyampaian laporan terkait adanya Laporan yang mengalami keterlambatan dan/atau perlu dikoreksi kembali sehingga dikenakan denda oleh Otoritas, diharapkan kejadian sedemikian tidak terulang kembali.
2. Unit Kerja kepatuhan pada setiap akhir bulan menerbitkan memorandum “Daftar Kewajiban Penyampaian Laporan Bulan Berikutnya”. guna mengingatkan unit kerja yang mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kepada BI, OJK maupun Otoritas lainnya.

Melalui penerbitan memo ini, unit-unit kerja yang berkewajiban diminta agar menyampaikan laporan-laporan kepada Bank Indonesia, OJK (Bapepam, Perbankan), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI) secara akurat dan tepat waktu.

3. Bilamana ada Perubahan atau Penerbitan Baru atas Peraturan/Ketentuan dari Bank Indonesia, OJK maupun Otoritas lainnya, maka Unit Kerja Kepatuhan menerbitkan memo pemberitahuan serta melakukan komunikasi dengan unit kerja terkait, memprakarsai pertemuan untuk membahas ketentuan-ketentuan baru atau adanya perubahan yang mendasar dari ketentuan sebelumnya.
4. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam upaya peningkatan *internal control* dilakukan melalui :
 - a. *Training*, sertifikasi manajemen risiko dan pelaksanaan *assessment* calon pimpinan.
 - b. Peningkatan *Internal Control* melalui :
 - 1) Pelaksanaan rotasi/mutasi karyawan;
 - 2) Penerapan cuti wajib karyawan; dan
 - 3) *Prinsip Know Your Employee*.

Untuk lebih mengenal karyawan maka Perusahaan meminta masing-masing karyawan untuk memberikan data terkini, melalui BI *Checking* khususnya kepada Pejabat Bank dilakukan upaya deteksi dini untuk mengetahui adanya karyawan yang bermasalah dalam pinjaman yang secara langsung/tidak langsung dapat mempengaruhi sikap bekerja.
 - c. Pengembangan *data based* SDM dengan sasaran untuk memudahkan bagi karyawan mendapatkan informasi langsung terkait SDM, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.
5. Untuk dapat menindaklanjuti temuan pemeriksaan OJK dengan baik, dilakukan pembahasan dalam rapat tersendiri. Dalam pertemuan tersebut ditentukan juga unit kerja atau *Personal in Charge* (PIC) yang akan menindaklanjutinya dan menyampaikan perkembangannya kepada Unit Kerja Kepatuhan.
6. Bukti penerimaan laporan yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, OJK maupun Otoritas lain, diadministrasikan oleh Unit Kerja Kepatuhan.
7. Pemenuhan Ketentuan yang diterbitkan oleh OJK khususnya dalam lingkup Konglomerasi Keuangan, Bank sebagai Entitas Utama telah melakukan komunikasi dengan Anggota Konglomerasi Keuangan yakni PT Buana Capital, baik melalui telepon, *e-mail* maupun pertemuan secara langsung berupa rapat. Besar keyakinan dengan adanya komunikasi yang baik, maka kedepannya ketentuan sebagaimana di atas dapat dipenuhi dengan baik.
8. Untuk penyampaian laporan yang bersifat khusus, dilakukan sendiri oleh Unit Kerja Kepatuhan.
9. Bukti penerimaan laporan yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, OJK maupun Otoritas lain, diadministrasikan oleh Unit Kerja Kepatuhan.

10. Dalam upaya mewujudkan agar Budaya Kepatuhan menjadi budaya kerja bagi semua SDM yang ada pada Bank, maka dalam setiap kesempatan yang memungkinkan, unit kerja Kepatuhan senantiasa menggaungkan Visi, Misi dan Nilai-nilai Kepatuhan :

Visi : Bank yang memiliki reputasi kepatuhan

Misi : Bekerja secara profesional, meraih prestasi dan reputasi kepatuhan

Nilai-Nilai :

1. *Awareness*
2. *Attention*
3. *Communication*
4. *Teamwork*

B. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi audit intern berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank merupakan tugas dan tanggung jawab dari *Internal Audit Group* yang merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Jumlah personil *Internal Audit Group* sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari 1 (satu) orang *Internal Audit Group Head* dan 3 (tiga) orang *Staff*. Penambahan jumlah personil audit akan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas Perseroan.

Sepanjang masa periode laporan ini, *Internal Audit Group* telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. Salah satu metode pemeriksaan yang dilakukan oleh *Internal Audit Group* berupa *Surprise Audit* ke beberapa Kantor Cabang dimana Rencana *Surprise Audit* hanya diketahui oleh *Internal Audit Group Head* dan Direktur Utama, dengan demikian pelaksanaan pemeriksaan ini tanpa pemberitahuan kepada Kantor Cabang yang akan diperiksa.

Hasil temuan pemeriksaan *Internal Audit Group Head* telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan. Direksi juga membuat catatan ataupun instruksi pada memorandum temuan hasil pemeriksaan *audit intern* tersebut. Saat penyelenggaraan Raker pada Sabtu, 28 Maret 2015 dan Sabtu 12 Desember 2015 diadakan juga pembahasan hasil temuan audit dan beberapa hal yang direkomendasikan terkait dengan hasil temuan audit. Dalam pengarahannya pada saat Raker, Direktu Utama meminta agar Rapat-rapat bulanan di kantor cabang supaya rutin dilakukan sebagai media untuk komunikasi dan sosialisasi setiap ketentuan kepada karyawan, sehingga risiko-risiko yang mungkin terjadi dapat dikendalikan serta sebagai wadah pembahasan atas hasil temuan audit dan evaluasi terhadap pencapaian target bisnis dan langkah-langkah yang telah dilakukan.

Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit termasuk hasil audit yang bersifat rahasia telah dilaporkan secara rutin kepada Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit Semester II/2015 telah disampaikan kepada OJK melalui surat NO.OJK/DIR/023/0216 tanggal 19 Februari 2016.

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2015

Untuk Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit Semester I/2015 disampaikan kepada OJK melalui surat NO.OJK/DIR/072/0815 tanggal 25 Agustus 2015.

Bank telah melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun. Laporan Hasil Kaji Ulang SKAI Periode Agustus 2011 s/d Juli 2014 oleh Sriyadi, Elly & Rekan Licence No.140/KM.1/2012 telah disampaikan Kepada OJK melalui surat No.OJK/DIR/072/0914 tanggal 18 September 2014.

C. Fungsi Audit Eksternal

Untuk melaksanakan audit laporan keuangan PT Bank Ina Perdana Tbk tahun buku 2014, Bank menunjuk KAP Mulyamin, Sensi Suryanto & Lianny yang terdaftar di Bank Indonesia dengan No 167, *Business License* No. 1219/KM.1/2011. KAP telah menyampaikan “Laporan *Final Audit Report* dan *Management Letter*” kepada OJK secara tepat. Dalam melakukan pemeriksaan Auditor mampu bekerja secara independen dan professional serta bertindak obyektif. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Sesuai kewenangan yang diberikan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No 48 tanggal 26 Juni 2015 dan atas rekomendasi Komite Audit maka untuk pelaksanaan audit laporan keuangan tahun buku 2015, PT Bank Ina Perdana Tbk menunjuk KAP Ernst & Young yang berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja yang terdaftar di OJK dengan No. 342, dengan beberapa pertimbangan bahwa KAP Ernst & Young merupakan salah satu dari *the big four auditors* Kantor Akuntan Publik yang banyak digunakan oleh perusahaan skala nasional maupun internasional; banyak digunakan oleh perusahaan yang sudah *Go Public* dan tercatat di bursa efek; dan mempunyai reputasi yang sangat baik dan dipercaya oleh investor maupun pengguna laporan keuangan lainnya.

D. Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain *Audit Intern Group*, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan. Dewan Komisaris memberi persetujuan atas Kebijakan Manajemen Risiko Bank termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*). Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko melalui *meeting* Komite Manajemen Risiko. Sepanjang tahun 2015, Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Bank telah melakukan langkah-langkah perbaikan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko.

Upaya peningkatan *risk awareness* tiap karyawan, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta peningkatan kualitas infrastruktur untuk Sistem Informasi Manajemen Risiko telah menunjukkan kemajuan meskipun masih harus terus diupayakan secara konsisten dan merupakan program jangka panjang yang harus terus dievaluasi dan disempurnakan.

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2015

Kualitas penerapan manajemen risiko secara keseluruhan dinilai “*Satisfactory*”. Proses identifikasi dan pengukuran risiko secara proaktif sudah dilakukan dan terus diupayakan agar dapat menjangkau seluruh aktifitas. Demikian pula proses monitoring sudah dilakukan secara berkala namun perlu peningkatan konsistensi dan ketepatan waktunya.

Peningkatan kualitas proses pengendalian intern Bank, difokuskan pada pembenahan sistem dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas proses dan prinsip *dual control* pada setiap pelaksanaan operasi karena disadari untuk dapat tercapainya tujuan perusahaan secara terarah dan terkontrol perlu dilengkapi dengan pedoman kerja yang menjadi petunjuk dan aturan baku dalam pelaksanaan tugas, sehingga setiap unit kerja dapat bekerja dengan baik serta dapat meningkatkan kualitas kerja.

Upaya meningkatkan budaya anti *fraud* secara konsisten terus dilaksanakan melalui sosialisasi pada berbagai kesempatan dan tidak memberikan ruang bagi upaya tindakan *fraud*. Hal tersebut diwujudkan dengan penandatanganan surat pernyataan *anti fraud* dan *anti conflict of interest*. Pengendalian intern ditingkatkan terutama melalui pengawasan di lapangan sehingga tidak terjadi lagi *fraud*.

Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Risiko bagi kegiatan usaha Bank, maka Bank mewajibkan Pengurus dan Pejabat Bank untuk memenuhi persyaratan memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sesuai jenjang jabatan dan struktur organisasi Bank. Bank juga telah mewajibkan sejumlah *staff* untuk mengikuti ujian sertifikasi Manajemen Risiko meski secara ketentuan belum diharuskan. Untuk menambah wawasan agar senantiasa berupaya meminimalkan/mitigasi risiko, pada tanggal 11 Desember 2015 bertempat di *Mercure Hotel* – Jakarta dilaksanakan *Refreshment* sertifikasi Manajemen Risiko kepada Pejabat Bank dengan materi *Cyber Crime IT Risk Management*.

- 000 -

BAB VI

KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESMENT* POSISI AKHIR DESEMBER 2015

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG Bank, ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan GCG Bank memperoleh peringkat 2 (dua) atau “**baik**”. Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara umum telah dilaksanakan, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini :

1. Ketentuan Bank Indonesia/OJK tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank. Hal tersebut dipertegas juga oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-1/PB.313/2014 tanggal 6 Januari 2014 Perihal Susunan Pengurus Bank.
2. Pembentukan Keanggotaan Komite telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bank Indonesia/ OJK. Komite-komite yang dibentuk telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yakni membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan perusahaan yang bersifat *strategic*.
3. *Audit Intern Group*, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
4. Dengan telah adanya penetapan terhadap PSP dan PSPT Bank diharapkan tidak ada lagi kendala dalam pengambilan keputusan untuk menentukan arah strategi bisnis Bank mendorong peningkatan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Bank, Dengan telah disetujuinya PT Philadel Terra Lestari sebagai PSP Bank, dapat dikatakan bisnis bank kedepannya jauh lebih jelas. Seiring adanya PSP baru maka peluang dan jaringan bisnis baru akan lebih terbuka, serta kepastian penguatan permodalan Bank semakin lebih jelas dimana PSP dan PSPT tidak ragu-ragu lagi untuk menambah kepemilikan sahamnya pada PT Bank Ina Perdana Tbk, sebagaimana komitmen mereka pada saat pengajuan PSP dan PSPT.
5. Kinerja Bank tahun 2015 dalam menghasilkan laba (rentabilitas) dinilai cukup baik dengan perolehan laba di atas target yang ditetapkan. Dalam RBB bahwa target laba kumulatif yang harus dicapai Bank tahun 2015 sebesar Rp 8,03 Miliar, pada akhir tahun 2015 Bank mampu mencatat Laba sebesar Rp 16,61 Miliar merupakan 206,85% *to budget (un audited)*. Kami rasa bahwa acara *gathering* yang dilaksanakan memiliki kontribusi yang tidak sedikit dalam pencapaian kinerja Bank hingga akhir Desember 2015.
6. Di sepanjang tahun 2015 tidak ada terjadi *Fraud*

Bank serius untuk mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan terjadinya *Fraud*, kolusi dan penyalahgunaan wewenang. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap tindakan *Fraud* dan menumbuhkan budaya *anti fraud* maka dalam periode laporan ini dalam upaya mencegah terjadinya *fraud* pada Bank, maka Bank menyelenggarakan Sosialisasi Pengendalian Intern dan Anti *Fraud* pada karyawan dengan nara sumber dari internal Bank. Dalam Acara ini, Direktur Kepatuhan (Dirkep) ikut serta memberikan pengarahan kepada Peserta Sosialisasi, dimana Dirkep memberi motivasi kepada Peserta agar bekerja dengan baik dan senantiasa mengembangkan diri, jujur dan tetap menjauhkan diri dari tindakan *fraud* yang dapat merugikan Perusahaan demikian juga diri sendiri.

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2015

Sebagai bagian dari *Know Your Employee* dalam Strategi Anti *Fraud* maka secara berkala dilakukan *BI Checking* kepada seluruh Pengurus dan Karyawan Bank, sebagai antisipasi dini terhadap kemungkinan adanya Pengurus dan Karyawan yang mengalami kredit macet. Hal ini merupakan suatu upaya untuk menjauhkan salah satu unsur penyebab terjadinya *fraud* berupa *Pressure* (tekanan) yang dialami karyawan.

7. Walaupun Bank Ina merupakan Bank yang dalam kategori BUKU 1, namun Bank Ina mampu menunjukkan prestasi di dunia Perbankan Nasional. Di bawah kepemimpinan Bpk. Edy Kuntardjo beserta jajaran Pengurus Bank lainnya, nama dan reputasi Bank Ina semakin dikenal di dunia perbankan nasional, telah menjadi perusahaan “*Go Public*” pada Januari 2014 yang lalu serta tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

BEI melalui Pengumuman No. Peng-00579/BEI.OPP/06-2015 tanggal 30 Juni 2015 menerbitkan “Daftar Saham Yang Masuk Dalam Perhitungan Indeks Infobank15 Periode Juli-Desember 2015”, dimana PT Bank Ina Perdana Tbk dengan Kode Saham BINA merupakan salah satu dari 15 (lima belas) Bank, masuk dalam daftar tersebut.

Selain hal di atas Bank Ina juga menunjukkan prestasi dalam berbagai *Event* yang diselenggarakan oleh pemeringkat prestasi.

Dalam tahun 2015 ini ada 4 (empat) penghargaan yang diterima Bank Ina, yakni :

- a. Pada tanggal 14 Agustus tahun 2015, menerima penghargaan dari Info Bank sebagai “Bank Yang Berpredikat Sangat Bagus Atas Kinerja Keuangan Tahun 2014”.
- b. Pada tanggal 22 Mei tahun 2015 menerima penghargaan dari *Indonesian Business Professional & Education Award* sebagai “*The Most Improvement Bank of Year 2015*”.
- c. Pada tanggal 13 Maret tahun 2015 menerima penghargaan dari *Indonesian Development Achievement Foundation* sebagai “*Leading Corporate In Finance Service of Year 2015*”.
- d. Pada tanggal 16 Januari tahun 2015, menerima penghargaan dari *Indonesian Creativity and Best Leader A Ward 2015* sebagai “*The Best Choice In Banking And Loyalty Service of The Year 2015*”.

Beberapa penghargaan lainnya yang diperoleh Bank Ina dalam beberapa tahun belakangan ini, yakni :

- a. Pada bulan April tahun 2014 menerima penghargaan dari *Indonesian Achievement & Best Performing For Category* “*The Best Performing Bank In Achieving Total Customer Satisfaction 2014*”.
- b. Pada bulan September tahun 2013 menerima penghargaan dari *Economic Review* berupa “Anugerah Perbankan Indonesia 2013 diberikan kepada Edy Kuntardjo – PT Bank Ina Perdana Bank Modal Inti < Rp 1 T Peringkat 2 *CEO in Leadership*”.
- c. Pada bulan April tahun 2013 menerima penghargaan dari Anugerah Citra Indonesia sebagai *The Best Improvement Bank Of The Year 2013*.
- d. Pada bulan Desember tahun 2012 menerima penghargaan dari Perbankan Nasional berupa :
 - 1) Peringkat 1 Kategori *The Best Bank 2012 in “Compliance”* Bank Umum Aset < Rp. 1 Triliun.

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2015

- 2) Peringkat 3 Kategori *The Best Bank 2012 in "Risk Management"* Bank Umum Aset < Rp. 1 Triliun.
 - 3) Peringkat 3 Kategori *The Best Bank 2012 in "Marketing"* Bank Umum Aset < Rp. 1 Triliun.
- e. Pada bulan Mei tahun 2012 menerima penghargaan dari Bisnis Indonesia yang menyatakan Bank Ina sebagai Bank Retail yang Efisien dalam menjalankan operasional Bank.

Jakarta, 21 Maret 2016

PT Bank Ina Perdana Tbk



Birawa Natapradja
Komisaris Utama Independen

Edy Kuntardjo
Direktur Utama

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)**

Nama Bank : PT Bank Ina Perdana Tbk

Posisi : 31 Desember 2015

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG																						
	Peringkat	Definisi Peringkat																				
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.																				
Analisis																						
<p>Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG Bank, ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan GCG Bank memperoleh peringkat 2 (dua) atau “baik”. Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> secara umum telah dilaksanakan, sebagaimana dapat dilihat bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Otoritas yang mengatur tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank. Hal tersebut dipertegas surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-1/PB.313/2014 tertanggal 6 Januari 2014 Perihal Susunan Pengurus Bank. 2. Kinerja Bank tahun 2015 dalam menghasilkan laba (rentabilitas) dinilai cukup baik dengan perolehan laba di atas target yang ditetapkan. Pencapaian target s/d posisi 31 Desember 2015 dapat dilihat sbb: <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <p>Dalam jutaan rupiah</p> <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Realisasi</th> <th style="text-align: center;">Target</th> <th style="text-align: center;">Pencapaian (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Assets</td> <td style="text-align: right;">2.081.339</td> <td style="text-align: right;">2.115.105</td> <td style="text-align: right;">98,40</td> </tr> <tr> <td>Funding</td> <td style="text-align: right;">1.734.291</td> <td style="text-align: right;">1.621.476</td> <td style="text-align: right;">106,96</td> </tr> <tr> <td>Lending</td> <td style="text-align: right;">1.456.506</td> <td style="text-align: right;">1.387.782</td> <td style="text-align: right;">104,95</td> </tr> <tr> <td>Profit/Loss</td> <td style="text-align: right;">16.616</td> <td style="text-align: right;">8.033</td> <td style="text-align: right;">206,85</td> </tr> </tbody> </table> </div> 3. Revisi Pedoman GCG Bank menyadari bahwa untuk dapat menerapkan tatakelola perusahaan yang baik harus didukung suatu pedoman pelaksanaan agar pelaksanaan dapat terarah dan terukur. Untuk itu, guna dapat menerapkan pelaksanaan GCG yang semakin baik, maka efektif 1 Desember 2015 pedoman GCG No. COM/001/00/0312 yang terbit Maret 2012 telah direvisi dengan No. COM/001/01/1215. 				Realisasi	Target	Pencapaian (%)	Assets	2.081.339	2.115.105	98,40	Funding	1.734.291	1.621.476	106,96	Lending	1.456.506	1.387.782	104,95	Profit/Loss	16.616	8.033	206,85
	Realisasi	Target	Pencapaian (%)																			
Assets	2.081.339	2.115.105	98,40																			
Funding	1.734.291	1.621.476	106,96																			
Lending	1.456.506	1.387.782	104,95																			
Profit/Loss	16.616	8.033	206,85																			

Revisi ini merupakan penyesuaian dengan ketentuan OJK No. 32 /POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; No. 33 /POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik; dan No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik. Dengan adanya Pedoman GCG yang baru ini besar harapan kedepannya pelaksanaan GCG Bank semakin baik.

4. Arah Bisnis yang lebih jelas

OJK melalui Surat No. SR-177/D.03/2015 Tanggal 16 September 2015, Hal Keputusan Uji Kemampuan dan Kelayakan (*Fit and Profer Test*) terhadap Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) PT Bank Ina Perdana Tbk, telah menyetujui PT Philadel Terra Lestari sebagai PSP dan Bpk Pieter Tanuri sebagai PSPT PT Bank Ina Perdana Tbk. Dengan telah disetujuinya PT Philadel Terra Lestari sebagai PSP Bank, dapat dikatakan bisnis bank kedepannya jauh lebih jelas, Seiring adanya PSP baru maka peluang dan jaringan bisnis baru akan lebih terbuka, sebagaimana disampaikan oleh PSPT pada Raker 12 Desember 2015.

Bpk. Pieter Tanuri selaku PSPT memberikan pengarahannya dan sambutan antara lain sebagai berikut :

- a. Pengambilalihan saham Bank Ina oleh PT. Philadel Terra Lestari dari pemilik saham lama sebanyak 20% dilandasi harapan agar Bank-Bank lokal tidak dikuasai sepenuhnya oleh investor asing.
- b. Bpk. Pieter Tanuri mempunyai misi untuk menjadikan PT Bank Ina Perdana Tbk sebagai Bank kelas atas dalam dunia perbankan, melalui pengembangan transaksi *Digital Banking*. Sejalan dengan perkembangan Era *Digital* yang terjadi saat ini, maka Bank Ina akan diarahkan untuk menjadi "*Digital Banking*". Bank Ina diyakini dapat melakukan hal tersebut dengan mempertimbangkan bahwa proses pengembangan *Digital Banking* dapat dimulai dari awal. Kondisi Bank Ina yang sekarang ini masih relatif kecil harus disyukuri karena lebih memberikan potensi dan peluang lebih mudah untuk dikembangkan.
- c. Rencana strategik tersebut akan didukung dengan peningkatan modal melalui proses *rights issue* yang akan dilaksanakan pada Semester I tahun 2016. Secara bertahap penambahan modal akan dilakukan sehingga BIP dapat memenuhi persyaratan permodalan sebagai Bank BUKU II.
- d. Dalam akhir pengarahannya, Bpk. Pieter Tanuri menyampaikan bahwa seluruh *stakeholder* harus menyambut gembira atas perubahan-perubahan yang akan terjadi. Pemegang Saham akan mengawal dengan baik setiap perkembangan yang terjadi pada Bank Ina.

5. Permodalan semakin kuat

- a. Pemilik mendukung sepenuhnya Rencana Strategis Bank, antara lain tercermin sebagaimana Surat Pernyataan atas komitmen PSP/PSPT untuk menambah porsi kepemilikan saham pada PT Bank Ina Perdana Tbk sampai dengan 30% demikian juga Surat Pernyataan "tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham dalam jangka waktu 5 tahun" yang dilampirkan pada dokumen pengajuan PSP/PSPT.
- b. Pencapaian Rentabilitas yang semakin baik, semakin memperkuat permodalan Bank (Pertumbuhan Organik).

- c. *Right Issue* yang direncanakan dilaksanakan pada Tw 2 Tahun 2016 adalah dalam rangka untuk memperkuat struktur permodalan Bank dan pemenuhan Modal Inti Bank sesuai dengan jaringan kantor.
6. Bank memberikan perhatian serius terhadap penerapan Strategi Anti *Fraud* dalam mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan melakukan *Fraud* serta kolusi dan penyalahgunaan wewenang. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam mencegah terjadinya *fraud*:
- a. Bank menyelenggarakan Sosialisasi Pengendalian *Intern* dan Anti *Fraud* pada karyawan dengan nara sumber dari internal Bank.

Pelaksanaan

Kantor	Tanggal	Peserta
Kantor Capem Klp Gading	11 September 2015	5 Orang
Kantor Capem Hayam Wuruk	15 September 2015	4 Orang
Kantor Capem Jatinegara	18 September 2015	4 Orang
Kantor Cabang Pasar Minggu, Capem Dewi Sartika, Kas UKI, Kas Cikini	22 September 2015	20 Orang
Kantor Capem UKRIDA 2 , Kas UKRIDA 1	2 Oktober 2015	8 Orang
Kantor Capem Mangga Dua	6 Oktober 2015	4 Orang
Kantor Cabang Abdul Muis, Kas Bethel	9 Oktober 2015	22 Orang
Kantor Capem Gading Serpong	20 Oktober 2015	9 Orang
Kantor Cabang Bandung	6 November 2015	10 Orang

- b. Untuk mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan melakukan *Fraud* serta kolusi dan penyalahgunaan wewenang, maka pada periode Laporan Semester II – Tahun 2015, telah dilakukan dilakukannya juga :
- ~ Proses mutasi dan rotasi beberapa karyawan.
 - ~ Pemberian izin cuti kepada karyawan yang telah memiliki hak cuti sebagaimana yang diatur dalam ketentuan “Cuti”.
 - ~ Penambahan Staff di beberapa unit kerja
- c. Program *Surprise Audit*.
- Pada periode Semester II – Tahun 2015, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) tetap melakukan *Surprise Audit* ke beberapa Kantor Cabang, karena dirasakan bahwa *Surprise Audit* merupakan salah satu cara yang cukup efektif dalam mendeteksi adanya *Fraud*. Rencana *Surprise Audit* hanya diketahui oleh *Internal Audit Group Head* dan Direktur Utama, dengan demikian pelaksanaan pemeriksaan ini tanpa pemberitahuan kepada Kantor Cabang/Unit Kerja yang akan diperiksa.
- d. *Refreshment* Manajemen Risiko
- Untuk menambah wawasan dalam rangka meningkatkan kesadaran Pimpinan unit kerja untuk selalu berupaya meminimalkan/mitigasi risiko di bidang IT, maka pada tanggal 11 Desember 2015 bertempat di Mercure Hotel – Jakarta dilaksanakan *Refreshment* Manajemen Risiko, materi yang disampaikan adalah mengambil thema “*Cyber Crime IT Risk Management*”.
- e. *Know Your Employee*
- ~ Untuk lebih mengenal karyawan maka melalui MEMO/HRS/292/0915 tanggal 7 September 2015 Perihal Pengkinian Data Karyawan, Perusahaan meminta masing-masing karyawan untuk memberikan data terkini.

~ Sebagai upaya deteksi dini untuk mengetahui adanya karyawan yang bermasalah dalam pinjaman yang secara langsung/tidak langsung dapat mempengaruhi sikap bekerja, maka melalui MEMO/HRS/428/1215 tanggal 18 Desember 2015 Perihal Permohonan BI *Checking*, Unit Kerja HRD meminta bantuan Unit Kerja *Loan Admin* perusahaan melakukan BI *Checking* khususnya kepada Pejabat Bank

7. Sepanjang periode Laporan Bank senantiasa mampu menjaga *ratio-ratio* keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sepanjang periode laporan ini, Bank telah menerapkan sistem pengendalian *intern* dan melakukan *monitoring* atas pelaksanaannya, namun demikian pada Periode Laporan tersebut terdapat pengenaan denda oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar Rp. 100.000,-. OJK melalui surat No. SR-36/PB.311/2015 tanggal 14 Desember 2015 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Umum Bank Posisi 31 Agustus 2015, serta mengenakan sanksi kewajiban membayar Rp. 100.000,- atas kesalahan pelaporan Laporan Bulanan Umum (LBU) KC Yogyakarta.

Pengunduran diri 3 (tiga) orang Pimpinan kantor mengakibatkan kekosongan pimpinan dalam beberapa waktu karena pimpinan baru untuk menggantikannya tidak segera didapat, sehingga hal ini mempengaruhi kinerja kantor tersebut. Adapun ketiga kantor tersebut adalah Capem Kembang Jepun dimana Sdr Ari Muryanto mengundurkan diri pada tanggal 5 Agustus 2015 dan belum ada penggantinya hingga Desember 2015, Kantor Cabang Yogyakarta dimana Sdr Rosdiana mengundurkan diri pada tanggal 24 Agustus 2015 sementara Pimpinan baru yaitu Sdr Ony Kurniawan efektif menjadi pimpinan pada tanggal 5 November 2015 demikian juga Kantor Cabang Lumajang dimana Sdr Kristanto mengundurkan diri pada tanggal 28 Agustus 2015 dan baru digantikan oleh Sdr Bambang Handoko efektif tanggal 16 Desember 2015.

Jakarta, 26 Januari 2016
PT Bank Ina Perdana Tbk



Wardoyo
Direktur Kepatuhan